

OMBUDSMAN JABAR AWASI KASUS KERACUNAN MBG DI KOTA CIREBON, DORONG EVALUASI MENYELURUH

Kamis, 22 Oktober 2026 - jabar

Siaran Pers

Nomor: B/067/HM.02.07/X/2026

Kamis, 22 Oktober 2026

BANDUNG - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) pada SPPG Kalijaga 05 Cirebon Harjamukti menyusul kasus dugaan keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada sejumlah sekolah dasar, TK dan posyandu di Kota Cirebon. Sidak ini dilakukan untuk memastikan penanganan korban berjalan dengan baik serta mendorong perbaikan tata kelola dan penguatan keamanan pangan.

Pada Rabu (21/10/2026), tim Ombudsman Jabar yang dipimpin langsung Plt. Kepala Perwakilan mengunjungi para korban yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Cirebon. Selanjutnya, tim mendatangi SPPG Kalijaga 05 Cirebon untuk meninjau sarana dan prasarana serta mendorong evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan MBG. Saat sidak, diketahui bahwa perwakilan dari Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN Pusat juga sedang melakukan pemeriksaan.

Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat, Fitry Agustine menyampaikan bahwa kejadian tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh pihak. "Keselamatan penerima manfaat merupakan prioritas utama. Kami mendorong evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program, mulai dari keamanan pangan hingga pengawasan dan pertanggungjawaban, agar kejadian serupa tidak terulang," ujarnya.

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat, Kepala KPPG Cirebon, Yulian Septa Pratama menegaskan bahwa pihaknya memandang permasalahan ini secara serius dan akan melakukan perbaikan menyeluruh terhadap tata kelola MBG dan menindaklanjuti saran masukan Ombudsman guna penanganan kasus agar seluruh korban terdampak mendapatkan penanganan secara cepat dan aman, mengingat kejadian fatal akibat dugaan keracunan MBG ini pertama kali terjadi di Kota Cirebon.

Ombudsman mendorong Satgas MBG Kota Cirebon melakukan pemeriksaan keamanan pangan, memastikan kepatuhan terhadap standar yang berlaku, serta memeriksa kelengkapan perizinan dari SPPG mulai dari SLHS, pengelolaan IPAL, hingga PBG. Selain itu, Ombudsman juga mendorong agar KPPG Cirebon (BGN) bersama mitra/yayasan menjamin seluruh korban memperoleh pengobatan secara penuh sesuai kebutuhan medis dan ketentuan yang berlaku.

Kepala Keasistenan Pemeriksaan Ombudsman Jabar, Sartika Dewi menegaskan bahwa evaluasi harus mencakup seluruh proses penyelenggaraan program.

"Pengawasan tidak hanya berfokus pada penanganan korban, tetapi juga pada evaluasi proses penyelenggaraan MBG. Keamanan pangan, kelengkapan perizinan, pemenuhan standar operasional, dan tindak lanjut pengaduan masyarakat perlu diperiksa secara menyeluruh sesuai kewenangan masing-masing pihak," ungkapnya.

Ombudsman juga mendorong penyampaian hasil pengawasan dan pemeriksaan secara terbuka kepada masyarakat dengan tetap melindungi data pribadi korban. Selain itu, KPPG bersama Satgas MBG perlu mengintegrasikan kanal pengaduan agar masyarakat mudah menyampaikan keluhan dan memperoleh tindak lanjut yang jelas.

Pada Kamis (22/10/2026), Ombudsman Jabar berkoordinasi dengan Wakil Wali Kota Cirebon Siti Farida beserta tim

Satgas MBG Kota Cirebon untuk membahas perkembangan kasus dan langkah penanganan selanjutnya. Hingga saat ini terdapat 331 orang terdampak kasus keracunan dari sejumlah kelompok masyarakat di Kecamatan Harjamukti seperti TK, posyandu, serta jenjang SD. Pemerintah Kota Cirebon telah membentuk Satgas Percepatan Penanggulangan untuk mengoordinasikan penanganan kasus tersebut.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Ombudsman Jabar atas pengawasan dan masukan yang diberikan. Kami juga memohon arahan untuk mendukung penanganan dan evaluasi kasus ini. Masukan yang disampaikan akan kami tindak lanjuti agar penanganan berjalan lebih baik dan kejadian serupa dapat dicegah," ujar Wakil Wali Kota Cirebon.

Ombudsman menegaskan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari tersalurkannya makanan kepada penerima manfaat, tetapi juga dari terjaminnya keamanan dan kelayakan makanan yang disajikan. Karena itu, koordinasi antarpihak, pengawasan berkelanjutan, keterbukaan informasi, jaminan penanganan korban, dan mekanisme pengaduan yang efektif perlu menjadi bagian dari perbaikan tata kelola program.

Melalui pengawasan ini, Ombudsman Jabar mendorong seluruh pihak terkait untuk menempatkan keselamatan dan hak penerima manfaat sebagai prioritas utama serta memastikan Program MBG berjalan secara aman, akuntabel, dan sesuai standar pelayanan yang berlaku.

Narahubung:

Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat